

Analisis Problemtika Negara-Negara Berkembang Mayoritas Muslim dalam Pembangunan Ekonomi

¹Sepiana Anwar, ²Tacika Nur Zabrina, ³Siti Nur Haliza,

⁴Irsyadi Ramadhan, ⁵Fitri Yetti

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

sepianaanwar1@gmail.com

Received: 6 December 2023

Revised: 25 July 2024

Published: 31 August 2024

Abstract

This research examines these to understand the clash. This is not necessarily in accordance with the needs and characteristics of the people in these countries. In addition, the role of education in providing access and skills to society is analyzed to understand its relationship with economic development, but also focuses on aspects of economic and social inequality, and the impact of inequality is then discussed in this research. Concerning equal distribution of economic opportunities and community participation in economic development. To understand how political factors influence the investment environment and economic growth, we evaluate political stability as a determinant of sustainable economic development. Through a detailed analysis of these issues, this study can provide a deeper understanding of the serious challenges facing developing countries with a majority Muslim population and provide a basis for establishing more effective and comprehensive policies to support sustainable economic development.

Keywords: *Developing country; Muslim majority; Economic Policy*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hal ini untuk memahami benturan. Hal ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di negara-negara tersebut. Selain itu, peran pendidikan dalam memberikan akses dan keterampilan kepada masyarakat dianalisis untuk memahami hubungannya dengan pembangunan ekonomi, namun juga berfokus pada aspek kesenjangan ekonomi dan sosial, dan dampak kesenjangan kemudian dibahas dalam penelitian ini. Tentang pemerataan peluang ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Untuk memahami bagaimana faktor politik mempengaruhi lingkungan investasi dan pertumbuhan ekonomi, kami mengevaluasi stabilitas politik sebagai faktor penentu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui analisis rinci terhadap isu-isu tersebut, studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan serius yang dihadapi negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya Muslim dan memberikan dasar untuk menetapkan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: *Negara Berkembang; Mayoritas Muslim; Kebijakan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang dengan populasi Muslim yang besar memiliki posisi yang strategis dalam peta perkembangan ekonomi global. Pemahaman yang mendalam mengenai kesulitan yang dihadapi negara-negara ini menjadi semakin penting karena dinamika globalisasi dan perubahan yang cepat dalam kancah ekonomi internasional. Tujuan akhirnya adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, namun ada banyak hambatan unik yang harus diatasi karena kompleksitas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi (Afif. et al. 2013).

Prasyarat mendasar untuk penerapan ekonomi Islam adalah larangan riba, maisir, gharar, dholim, dan haram. Oleh karena itu, umat Islam di mana pun diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan hukum Islam dalam ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam. Umat Islam diwajibkan untuk mematuhi hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai sarana untuk tunduk kepada Allah SWT. Inilah yang menjadi landasan ekonomi Islam di masyarakat. Meskipun memiliki banyak pendukung, ekonomi yang diatur oleh hukum Islam tidak tumbuh secepat ekonomi lama. Baik Muslim maupun non-Muslim harus mematuhi hal ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam itu sendiri berusaha untuk membawa kenikmatan bagi semua orang dan juga keuntungan (Sjahdeini, 2014).

Praktik keuangan Islam berkembang secara global dengan kemajuan globalisasi, mendapatkan popularitas di beberapa benua dan wilayah seperti Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika Utara, Kanada, dan Timur Tengah. Dengan nilai \$882 miliar, atau Rp11.466 triliun, perbankan syariah merupakan salah satu sistem ekonomi Islam yang paling terkenal di seluruh dunia, dengan menetapkan lima kriteria - advokasi, infrastruktur, sumber daya manusia, jaringan, dan regulasi - dalam Global Islamic Finance Report 2015. 10 Pusat Keunggulan dalam Perbankan dan Keuangan Islam terdiri dari sepuluh negara berikut ini:

1. Kuala Lumpur – Malaysia
2. Manama – Bahrain
3. Dubai – UAE
4. London - United Kindom
5. Doha – Qatar
6. Kuwait - Kuwait
7. Karachi – Pakistan
8. Riyadh - Saudi Arabia
9. Jakarta – Indonesia
10. Istanbul – Turkey⁶

Berdasarkan data tersebut, peringkat pertama masih ditempati Malaysia, dan Indonesia berada di peringkat kesembilan. Pertanyaan utama survei ini adalah bagaimana perekonomian Islam berkembang di seluruh dunia (Maldiaji, Vol.3 No.2).

TINJAUAN PUSTAKA

Frasa "negara berkembang" menggambarkan negara-negara yang, dibandingkan dengan negara maju atau negara industri, memiliki tingkat pembangunan ekonomi,

sosial, dan infrastruktur yang relatif lebih rendah. Mayoritas negara di dunia disebut sebagai "negara berkembang", dan istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang sedang berusaha untuk maju atau berkembang di berbagai bidang.

Dibandingkan dengan negara kaya, negara berkembang sering kali memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah. Tingkat pendapatan yang rendah merupakan indikasi dari pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung. Mayoritas penduduk di negara berkembang masih mengandalkan sektor pertanian untuk hidup mereka, dan sektor ini masih menjadi industri yang dominan. Ada kemungkinan bahwa modernisasi dan diversifikasi ekonomi adalah proyek yang sedang berlangsung.

Negara-negara berkembang memiliki populasi yang relatif muda, dengan sebagian besar penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Mengelola pertumbuhan populasi dan menciptakan lapangan kerja merupakan tantangan besar (Fuadi, 2015)

Konsep Pembangunan Ekonomi

Istilah "pembangunan ekonomi" adalah "pembangunan" dan "ekonomi". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang berkaitan dengan perubahan kinerja industri, pertanian, dan perdagangan, dan pembangunan sebagai hasil dari usaha pembangunan (Badudu, 2001).

Proses kenaikan pendapatan per kapita riil suatu masyarakat dalam jangka waktu yang lama merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menjadi dasar definisi dalam penelitian ini (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005). Konsep ini mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses penambahan, peningkatan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan proses pembangunan ini akan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Untuk mencapai pembangunan nasional, pertumbuhan sektor ekonomi di setiap daerah di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan daerah tersebut agar pembangunan secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang kohesif (Choirullah, 2007).

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multifaset yang mencakup seluruh aspek dan kebijakan baik dalam skala ekonomi global maupun non-ekonomi. Oleh karena itu, tujuan pembangunan minimal yang ditetapkan menurut Todaro (1983) dan Suryana (2000) adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan alokasi sumber daya penting yang diperlukan untuk kehidupan, seperti tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan lingkungan.
- b. Standar hidup yang lebih tinggi berarti lebih banyak uang, kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan fokus yang lebih besar pada nilai-nilai budaya manusia. Hal ini membantu masyarakat dan orang-orang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri selain memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c. Memberikan semua orang dan masyarakat pilihan ekonomi dan sosial yang lebih luas, melepaskan mereka dari perbudakan, ketergantungan, dan bahkan hubungan dengan negara tetangga yang menyebarkan kebodohan dan penderitaan...Model pembangunan ada empat, yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, serta model pembangunan yang berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan dasar (Suryana, 2000). Berdasarkan model pembangunan ini, segala sesuatunya menyangkut peningkatan kualitas hidup, peningkatan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, pencapaian taraf hidup minimum seluruh anggota keluarga dan pencapaian tujuan tersebut. Bertujuan untuk. Tujuannya adalah untuk mencapai batas atas.

Sejarah Pembangunan Ekonomi Islam

Bab yang menarik dalam evolusi ekonomi Islam adalah sejarah bidang ini dari tahun 1960 hingga 1980. Teori ekonomi Islam berkembang secara signifikan selama periode ini, dan sejumlah gagasan baru dikembangkan dan dipraktikkan. Teori ekonomi Islam dipengaruhi oleh pergeseran sosial dan politik yang terjadi selama periode ini (Huda, 2021).

Teori ekonomi Islam berkembang pada tahun 1960-an dan 1980-an sebagai respons terhadap kesulitan dan pergeseran dalam masalah sosial, politik, dan ekonomi di dalam komunitas Islam. Aliran pemikiran ini berusaha untuk mendamaikan ajaran ekonomi Islam dengan realitas sosial ekonomi kontemporer. Konsep untuk menafsirkan kembali ajaran Islam dan menerapkannya pada ekonomi muncul dari sana.

Pada masa ini, sejumlah ekonom Islam, termasuk Muhammad Baqir al-Sadr, Syed Abul Ala Mawdudi, dan Syed Qutb, muncul sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pertumbuhan teori ekonomi Islam. Gagasan-gagasannya memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam pada saat itu dan terus berdampak hingga saat ini (Faturrohman, 2021).

Peran Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, sektor pendidikan memainkan peran yang sangat penting dan mendesak dalam pembangunan nasional. Selain itu, setiap orang memiliki kebutuhan mendasar akan pendidikan. Karena Anda dapat menciptakan struktur kehidupan yang luar biasa jika Anda memiliki bakat yang luar biasa. Melalui pendidikan, kita dapat membangun dan memperkuat daya saing nasional dan produktivitas tenaga kerja individu, terutama dalam periode globalisasi saat ini. Secara khusus, langkah-langkah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan daerah harus diambil untuk mempercepat pembangunan sektor ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mulai tahun 2019, strategi terkait ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Karena negara harus terus meningkatkan daya saingnya untuk memenuhi tuntutan ekonomi global, rencana ini perlu didukung oleh pengguna dan talenta dari semua industri.

Ada beberapa contoh ketika globalisasi ekonomi menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpastian. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, memperoleh pendidikan sangat penting untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Fondasi pembangunan adalah pengembangan keterampilan manusia yang lebih besar, yang hanya dapat dicapai dengan pendidikan. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa siap negara-negara berkembang untuk mengasimilasi teknologi kontemporer dan membangun kapasitas yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi mendapat banyak manfaat dari pendidikan, yang kini telah diterima sebagai sebuah realitas dasar.

Penelitian empiris dan penyelidikan akademis lainnya telah menunjukkan kebenarannya. Selain menghasilkan tenaga kerja berketerampilan tinggi yang memiliki pengetahuan teknologi, pendidikan juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang positif, yang pada gilirannya merangsang ekspansi ekonomi. Sebagai hasilnya, berinvestasi dalam pendidikan akan memberikan manfaat bagi dunia usaha, masyarakat secara keseluruhan, dan juga manusia. Pendapatan dan produktivitas masyarakat pasti akan meningkat dengan tercapainya pendidikan di semua sektor dan di semua tingkatan. Mendapatkan pendidikan adalah salah satu pendekatan untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sementara itu, kurangnya kemajuan pendidikan akan mengakibatkan sejumlah masalah serius, termasuk penyalahgunaan narkoba, pengangguran, kriminalitas, dan ketergantungan kesejahteraan, yang semuanya akan membebani sumber daya sosial dan politik pemerintah (Khusaini, 2004).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini bersifat kuantitatif. Laporan resmi, survei, dan sumber data ekonomi dunia merupakan sumber data kuantitatif. Indikator-indikator stabilitas politik, pendidikan, dan ekonomi diperiksa dengan menggunakan data ini untuk melihat tren dan pola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya bank-bank syariah di setiap negara merupakan indikator lain dari globalisasi ekonomi Islam. Sistem perbankan berbasis syariah dengan organisasi keuangan yang berlandaskan etika yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis merupakan fondasi ekonomi Islam.

Bank-bank syariah muncul sebagai penyelamat beberapa tahun yang lalu ketika krisis ekonomi global melanda. Bank ini berkembang menjadi area pertumbuhan keuangan internasional yang signifikan. Saat ini, sejumlah negara berlomba-lomba membangun diri mereka sebagai pusat keuangan internasional berdasarkan syariah. Mirip dengan London, yang jauh lebih berkembang daripada New York dan telah muncul sebagai contoh utama ekonomi syariah di Eropa (Cahyono (2016)

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam bagaimana kebijakan ekonomi diimplementasikan di negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun beberapa negara telah berhasil menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masalah efisiensi, transparansi, dan distribusi kekayaan yang adil masih ada.

Perbedaan keadaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim dapat tercermin dalam variasi cara penerapan kebijakan ekonomi di negara-negara ini. Beberapa penyebab dapat berkontribusi terhadap perbedaan ini, termasuk:

1. Struktur Ekonomi: Negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki struktur ekonomi yang beragam, yang meliputi industri penting seperti jasa, industri, dan pertanian. Cara kebijakan ekonomi diimplementasikan harus mempertimbangkan kualitas khas dari masing-masing formasi ekonomi ini.
2. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan: Setiap negara memiliki tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan akses terhadap sumber daya kesehatan dan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana masalah-masalah tersebut ditemukan.
3. Tantangan terkait Stabilitas Politik: Tingkat stabilitas politik dan lingkungan politik di negara mana pun dapat berdampak pada bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan. Mungkin sulit bagi negara-negara yang menghadapi kerusuhan politik untuk melakukan reformasi ekonomi yang penting.
4. Hubungan dengan Pasar Internasional: Ketergantungan negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim terhadap perdagangan dan hubungan ekonomi dengan pasar internasional berbeda-beda. Perdagangan, investasi, dan reaksi terhadap dinamika ekonomi global dapat dipengaruhi oleh hal ini.
5. Kebijakan Moneter dan Fiskal: Perbedaan kebijakan moneter dan fiskal dapat menyebabkan variasi dalam cara setiap negara merespons tantangan ekonomi. Misalnya, kebijakan suku bunga, kebijakan anggaran, dan manajemen mata uang dapat berbeda tergantung pada keadaan ekonomi masing-masing negara.
6. Faktor Budaya dan Agama: Nilai-nilai budaya dan agama dapat memiliki dampak signifikan pada bagaimana suatu negara merumuskan kebijakan ekonomi. Beberapa negara mungkin mengadopsi model ekonomi yang lebih sekuler, sementara yang lain mungkin lebih condong ke prinsip-prinsip ekonomi Islam.
7. Kapasitas Kelembagaan: Efektivitas dan kapabilitas lembaga-lembaga pemerintah berdampak pada bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan. Institusi yang kuat dan fungsional biasanya dikaitkan dengan implementasi kebijakan yang lebih baik di suatu negara.

Perbedaan ini menyoroti betapa pentingnya memahami konteks lokal dan mempertimbangkan variasi dalam pengembangan dan penerapan kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang dengan mayoritas Muslim. Strategi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik unik masing-masing negara diperlukan karena strategi yang efektif di satu negara mungkin tidak efektif di negara lain (Republika, 2019).

PERAN PENDIDIKAN

Pembangunan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh pendidikan. Keberhasilan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tercermin dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan keterampilan. Kesenjangan pendidikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah.

Menurut sejarah sosial Indonesia, hampir semua bidang pekerjaan di negara ini mensyaratkan pendidikan formal pada tahun-tahun awal rezim Orde Baru.

Akibatnya, individu dengan tingkat pendidikan yang sesuai merasa mudah untuk berintegrasi ke dalam dunia kerja. Selain itu, pemerintah kolonial menyediakan pendidikan formal bagi para bangsawan lokal, yang kemudian mendapatkan keuntungan dari pendidikan tersebut karena dapat bekerja di tanah jajahan pada saat prinsip-prinsip moral memainkan peran penting dalam pemerintahan. Perwakilan. bahkan untuk karyawan tingkat rendah dalam skala sederhana. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai cara untuk mencapai stabilitas masyarakat pada saat itu.

Perluasan dan peningkatan infrastruktur pendidikan untuk siswa merupakan faktor lain yang mendukung klaim bahwa pendidikan formal dan sekolah dapat menghasilkan kesuksesan ekonomi. didukung oleh kurikulum kursus. Agar siswa potensial menjadi talenta yang benar-benar gigih dan berhasil di pasar tenaga kerja yang kompetitif, lembaga pendidikan harus terus berinovasi dalam menghadapi persaingan global. Hal ini akan memastikan bahwa talenta dengan keterampilan dan kemampuan yang unggul tidak hanya muncul sebagai pemenang dalam persaingan tetapi juga menumbuhkan sikap positif (Hilman, 2022).

PARADIGMA PEMBANGUNAN NEGARA MAYORITAS MUSLIM

Metode dan gagasan yang mengarahkan inisiatif pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim disebut sebagai paradigma pembangunan negara-negara mayoritas Muslim. Dalam kerangka Islam, paradigma ini tercermin dalam peraturan pemerintah, norma-norma budaya, dan tujuan-tujuan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri paradigma pembangunan yang lazim di negara-negara dengan mayoritas Muslim:

- a. Pendekatan yang Didasarkan pada Islam
Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam terhadap pembangunan, yang mencakup konsep keadilan, keseimbangan, dan moralitas, sering kali ditekankan oleh paradigma ini.
- b. Keseimbangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
Keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sering ditekankan dalam paradigma ini.
- c. Pemerataan dan Keadilan
Paradigma ini berpusat pada prinsip-prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya dan kesempatan. Ada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai kelompok sosial.
- d. Keseimbangan Antara Nilai-nilai Modern dan Konvensional
Paradigma ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim sering kali mengintegrasikan elemen-elemen modern ke dalam pertumbuhan ekonomi mereka tanpa mengorbankan identitas budaya atau keyakinan Islam.
- e. Perkembangan Ekonomi Syariah
Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, beberapa negara dengan mayoritas Muslim dapat membentuk sektor keuangan dan ekonomi syariah. Hal ini menggambarkan

inisiatif yang dibuat untuk merancang struktur ekonomi yang konsisten dengan ajaran agama (Asnaini, 2014).

KETIDAKSETARAAN EKONOMI

Telaah atas kesenjangan ekonomi menunjukkan adanya perbedaan dalam bagaimana kekayaan didistribusikan di berbagai negara. Mengurangi kesenjangan antara berbagai kelompok ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan di semua tingkat masyarakat merupakan isu utama (Istiqomah, 2019).

PROBLEMATIKA EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara berkembang menghadapi beberapa kendala yang dapat berdampak pada kapasitas mereka untuk berkembang secara ekonomi, memberikan kesejahteraan sosial, dan menjaga stabilitas nasional:

- a. Kemiskinan dan kesenjangan: Di negara-negara berkembang, tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi sering kali menjadi masalah serius. Kesenjangan dalam akses ke layanan dasar dan peluang ekonomi dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan.
- b. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Ekspor sumber daya alam seperti logam, minyak, dan gas merupakan sumber pendapatan utama bagi beberapa negara berkembang. Karena ketergantungan ini, ekonomi mungkin lebih rentan terhadap perubahan harga komoditas di pasar global.
- c. Ketidakstabilan Ekonomi Makro: Inflasi, perubahan nilai mata uang, dan defisit anggaran adalah contoh-contoh ketidakstabilan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Ketidakstabilan ini dapat diakibatkan oleh kebijakan moneter dan fiskal yang tidak seimbang.
- d. Krisis Keuangan: Krisis keuangan memiliki potensi untuk membahayakan stabilitas sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara berkembang. Krisis keuangan dapat diakibatkan oleh masalah utang luar negeri, spekulasi mata uang, dan kerentanan terhadap guncangan dari luar.
- e. Pembatasan Infrastruktur: Pembatasan jalan, transportasi, dan ketersediaan listrik dapat menghambat investasi dan kemajuan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menurunkan daya saing dan meningkatkan biaya produksi.
- f. Tingkat Pengangguran yang Tinggi: Pengangguran yang terlalu tinggi, terutama bagi kaum muda, dapat menyebabkan keresahan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja yang cukup adalah masalah besar, terutama ketika populasi tumbuh dengan cepat.
- g. Ketidakstabilan dan Konflik Politik: Isu-isu politik, seperti perselisihan internal dan ketidakstabilan politik, dapat menghambat investasi dan ekspansi ekonomi. Pembangunan jangka panjang dapat terhambat oleh ketidakpastian politik, yang dapat menurunkan kepercayaan investor.

Negara-negara berkembang harus memberlakukan kebijakan yang tepat, memperkuat institusi-institusi mereka, dan melakukan perubahan struktural untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi ini. Mallarangeng (2002) mengatakan **Pelajaran Bagi**

NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara berkembang dapat belajar banyak dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi hambatan pertumbuhan secara efektif. Diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, kebijakan ekonomi makro yang bijaksana, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi untuk inovasi adalah beberapa pelajaran yang dapat membantu negara-negara berkembang.

Sangat penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda, dan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan tuntutan dan fitur masing-masing wilayah. Selain itu, negara-negara berkembang dapat mengambil inspirasi dan pengetahuan dari pencapaian dan kesalahan negara lain untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang efisien (Dalton, 1974).

SIMPULAN

Menurut temuan studi ini, sejumlah variabel sangat penting untuk memahami isu-isu pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim. Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, pentingnya kebijakan ekonomi yang baik, dan kontribusi pendidikan terhadap pengembangan tenaga kerja yang terampil ditekankan. Meskipun penerapan inovasi dan teknologi merupakan hal yang menantang, stabilitas politik sangatlah penting. Strategi dan saran kebijakan yang dapat mengurangi masalah-masalah ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di negara-negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim akan dibahas secara lebih rinci nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad Fadhil dkk. Peradaban Islam di Tahiland. (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013).
- Asnaini. "Islamic Social Finance: Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." Mizania. Vol. 24. No. 1. Juni 2014
- Badudu, Zain, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Choirullah. 2007. Ekonomi Pembangunan. <http://epserv.fe.unila.ac.id>. Diakses : 01 Februari 2015, 19.30 WIB
- Cahyono, Yeni dan Edy Kurniawan. (2016). Perkembangan Perekonomian Syari'ah Pada Masyarakat Ponorogo. Muaddib 06 (02)
- Dalton, George. Economic System and Society. Kingsport, Tenn: Kingsport Press. 1974
- Fathurohman, Imron, et al. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Maqrizi." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(01), 143-153.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme." JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Vol. 5, No. 1. Juni 2015.
- Huda, Muhammad Nurul. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Estoria: Journal of Social Science and Humanities, 1(2), 135-148.
- Hilman, Jajang. (2022). Menengok Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafah Al-Rashidah dan Perannya.
- Istiqomah, Lailatul. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 1-19.
- Khusaini. 2004. Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Banten. JIPIS. Vol. 2, No. 2.
- Mardiah, Nur Hilda. Kepentingan Ekonmi Politik Singa pura Dalam Menerapkan Ekonomi

Islam. JOM FISIP, Vol.3 No.2.

Republika. Zona Ekonomi Islam : Perkembangan Ekonomi Islam di Dunia. diakses 9 April 2019 dari <http://zonaekis.com/perkembanganekonomi-islam-di-dunia/>

Sjahdeini, Sultan Remi. Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. (Jakarta: Kencana, 2014).

Sukirno, Sadono 2000. Makro Ekonomi Modern :perkembangan pemikiran klasik hingga Keynesian baru. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suryadi, Ace dan Tilaar, H. A.R., "Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar", Rosda Karya Bandung, 1994

Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.